

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Regita Cahyaningrum, P. Eko Prasetyo

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang

cahyaningrumregita3@gmail.com

ABSTRACT

Financial independence is one of the goals of decentralization. In Central Java, over a period of 28 years, financial independence has shown an upward trend. On the other hand, inequality, open unemployment rates, human development indices, and economic growth have also shown similar upward trends. The purpose of this study is to analyze the influence of inequality, open unemployment rate, Human Development Index, and economic growth in the long and short term on regional financial independence in Central Java. This study is quantitative research using secondary data in the form of time series data from 1996 to 2023 sourced from the Central Statistics Agency (BPS) and processed using the Eviews 12 application with the Vector Error Correction Model (VECM) analysis method. The results of the study show that in the long term, the open unemployment rate and economic growth have a significant negative effect on regional financial independence. The Human Development Index has a significant positive effect, while inequality has no significant effect on regional financial independence. In the short term, both lag 1 and lag 2 show that only economic growth has a significant negative impact on regional financial independence. Unemployment affects regional financial independence in the long term, while the human development index affects regional financial independence in the short term. Economic growth does not guarantee an increase in regional financial independence. Local governments need to maintain equitable development, reduce structural unemployment, improve workforce skills, and integrate human resource quality with local economic strengthening. They also need to optimize the local revenue sector and taxation to ensure that economic growth has a direct impact on regional fiscal capacity.

Keywords: Regional financial independence, inequality, open unemployment rate, human development index, economic growth

ABSTRAK

Kemandirian keuangan merupakan salah satu tujuan dari desentralisasi, di Jawa Tengah dalam kurun waktu 28 tahun, kemandirian keuangan menunjukkan tren kenaikan disisi lain baik ketimpangan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan tren kenaikan serupa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Ketimpangan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi dalam jangka panjang maupun jangka pendek, terhadap kemandirian keuangan daerah di Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder berupa data *time series* tahun 1996 - 2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta diolah menggunakan aplikasi Eviews 12 dengan metode analisis *Vector Error Correction Model* (VECM). Hasil penelitian menunjukkan dalam jangka panjang Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif signifikan sementara ketimpangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

dalam jangka pendek baik pada lag 1 maupun lag 2 hanya pertumbuhan ekonomi yang memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pengangguran mempengaruhi kemandirian keuangan daerah dalam jangka panjang, indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dalam jangka pendek serta pertumbuhan ekonomi tidak menjamin peningkatan kemandirian keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu menjaga pemerataan pembangunan, menekan pengangguran struktural, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mengintegrasikan kualitas SDM dengan penguatan ekonomi lokal. Serta optimalisasi sektor PAD dan perpajakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah.

Kata kunci: Kemandirian keuangan Daerah, ketimpangan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi

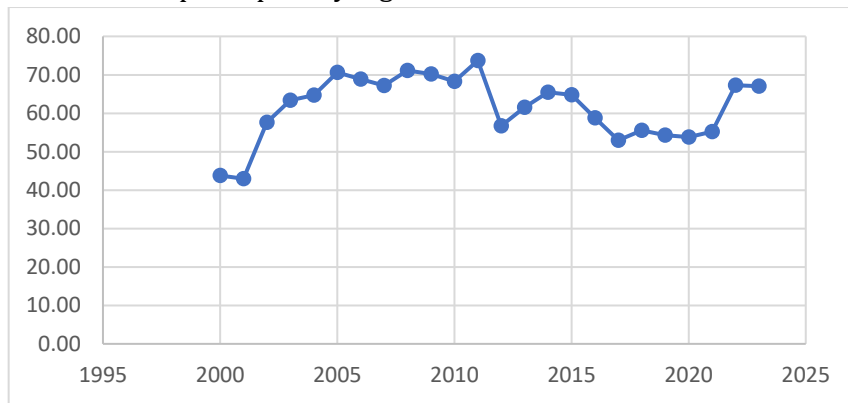
PENDAHULUAN

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan desentralisasi. Desentralisasi ditetapkan untuk mengurangi kontrol absolut dari pemerintah pusat yang dapat menciptakan ketergantungan dan menghambat pembangunan di daerah, dengan diberlakukannya desentralisasi, daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sendiri pemerintahan serta ekonominya melalui otonomi daerah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing, hal ini dapat mendorong inovasi serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif serta mendorong pembangunan ekonomi, dengan begitu daerah dapat memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya keuangannya termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak, retribusi, dan sumber daya lainnya.

Undang-undang yang mengatur tentang desentralisasi antara pemerintah pusat dengan daerah sebelumnya telah lama disahkan melalui UU no.5 tahun 1974, undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah serta hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah. Undang-undang No. 5 tahun 1974 dalam pelaksanaannya sangat jauh dari prinsip desentralisasi dan cenderung sentralistik karena adanya praktik sentralisasi yang terselubung Suseno, (2013). Di era reformasi masyarakat mendorong dibentuknya undang-undang yang lebih tegas dalam mengatur kendali pemerintah pusat agar desentralisasi yang sesungguhnya dapat terlaksana dengan baik. Dan selanjutnya lahirlah UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. UU No. 22 tahun 1999 kemudian di perbarui melalui UU No. 32 tahun 2004 di jelaskan dalam undang-undang tersebut otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada UU nomor 25 tahun 1999 di mana pelimpahan kewenangan tersebut didesain dengan menggunakan prinsip “uang mengikuti kewenangan” artinya ketika wewenang dilimpahkan ke pemerintah daerah maka uang pengelolaan kewenangan tersebut

juga turut di limpahkan ke daerah yang bersangkutan Nafiah & Wardhani Evita Dyah, (2023)

Disebutkan dalam undang-undang No. 25 tahun 1999 sumber-sumber keuangan daerah berasal dari empat sumber utama yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah sendiri berasal dari berbagai sumber yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.



Gambar 1 derajat desentralisasi fiskal Jawa tengah tahun 2000-2023
sumber: bandan pusat statistik

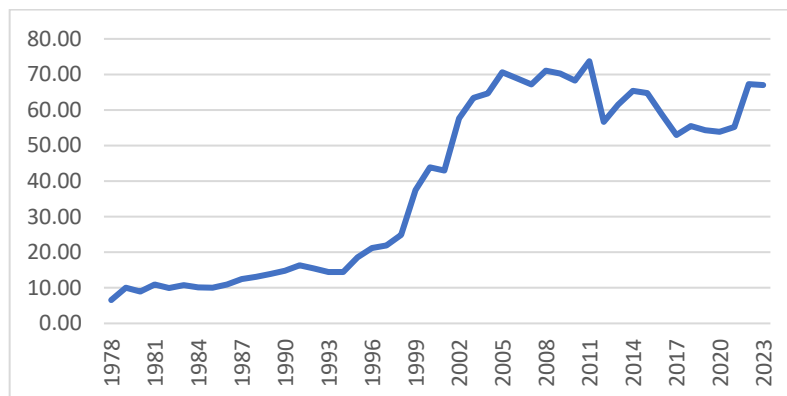
Derajat desentralisasi fiskal Jawa tengah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari yang semula di tahun 1995 derajat desentralisasi hanya berada di kisaran 18% di tahun 1999 angkanya menyentuh 37% dan terus meningkat seiring waktu hingga menyentuh titik tertingginya diangka 73% pada tahun 2011. Meningkatnya rasio PAD terhadap APBD menandakan pembiayaan pemerintah daerah sudah tidak bergantung sepenuhnya pada dana perimbangan, otomatis kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi lebih baik dari sebelumnya.

Table 1 kategorisasi derajat desentralisasi fiskal

Kategori	Persentase
Sangat kurang	0 % - 10%
kurang	10,01 % - 20%
cukup	20,01% - 30%
sedang	30,01% - 40%
baik	40,01% - 50%
Sangat baik	>50%

sumber: statistik keuangan pemerintah provinsi 2022-2023

Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan kemandirian keuangan daerah yang cukup tinggi tak serta merta dapat mengabaikan tantangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena menurut data dari BPS Jawa Tengah telah mengalami penurunan kemandirian keuangan daerah setidaknya dalam 10 tahun terakhir.



Gambar 2 derajat desentralisasi fiskal Jawa tengah tahun 1978-2023

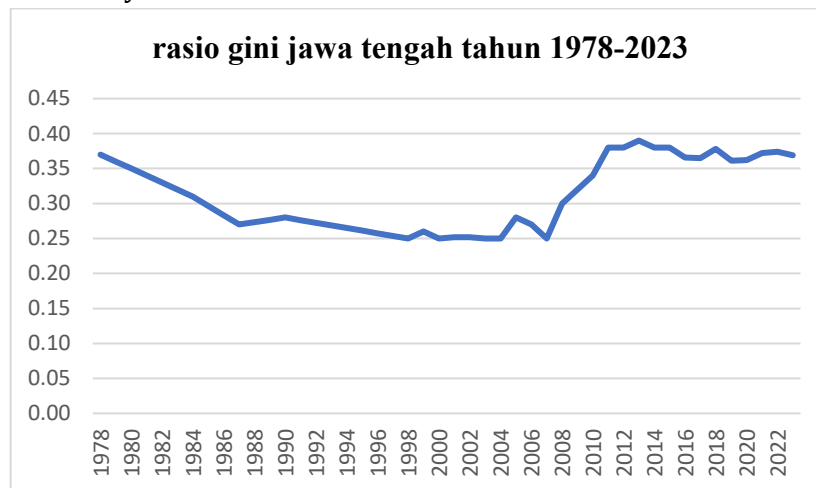
sumber: badan pusat statistik

Tahun 2012 terjadi penurunan kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal Jawa tengah turun cukup drastis dari yang pada tahun 2011 ada diangka 73% di tahun 2012 menyentuh angka 56 % menjadi titik terendah dalam 10 tahun terakhir. Meski ditahun-tahun selanjutnya derajat desentralisasi menunjukkan peningkatan namun nilainya cenderung fluktuatif dan hingga tahun 2023 derajat desentralisasi Jawa tengah belum kembali ke titik tertingginya seperti yang terjadi di 2011. Penurunan derajat desentralisasi Jawa tengah mengindikasikan adanya beberapa permasalahan yang kompleks terkait komponen penerimaan daerah baik yang disebabkan oleh tata kelola pemerintahan maupun permasalahan sosial ekonomi yang ada di Jawa tengah.

Permasalahan sosial ekonomi dapat tercermin dari beberapa indikator seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, kemiskinan dan lain sebagainya, di satu sisi dana perimbangan dari pemerintah pusat memberikan manfaat bagi upaya terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah, namun di sisi lain adanya dana perimbangan dengan persentase yang cukup besar menandakan pemerintah daerah belum mampu menjalankan otonomi daerah dalam menciptakan sumber pendapatan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan daerah itu sendiri atau dengan kata lain kemandirian keuangan daerah belum tercapai.

Hal ini penting karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bestari (2018), dana perimbangan berupa DAU, DAK dan DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, ketergantungan terhadap pusat dapat menghambat pembangunan, memperbesar ketimpangan antar daerah dan melemahkan akuntabilitas serta partisipasi lokal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiaji & P.H. Adi (2007), Pelaksanaan desentralisasi fiskal justru dapat meningkatkan ketergantungan fiskal jika daerah masih bergantung pada dana perimbangan pemerintah pusat, hal ini merupakan akibat dari pendapatan asli daerah yang tidak mampu membiayai belanja daerah sehingga untuk memenuhi kebutuhan daerahnya pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat.

Kesejahteraan masyarakat yang berupaya diwujudkan melalui kemandirian keuangan daerah dapat tercermin dari berbagai indikator beberapa diantaranya yaitu rendahnya ketimpangan pendapatan, minimnya angka pengangguran, indeks pembangunan manusia yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan ukuran penerimaan yang diperoleh tiap individu yang menyebabkan kesenjangan antar masyarakat golongan atas dan bawah Rifaldo & Rejekiningsih, (2024) indikator statistik yang dapat mengukur tingkat ketimpangan pendapatan, salah satunya yaitu rasio gini, Rasio gini memberikan gambaran yang luas serta ringkas terkait ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat, efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dapat dievaluasi dengan melihat perubahan pada rasio gini dari waktu ke waktu apakah kebijakan yang diterapkan berhasil mengurangi ketimpangan atau tidak, karena ketimpangan yang tinggi dapat berpengaruh pada stabilitas sosial pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat.



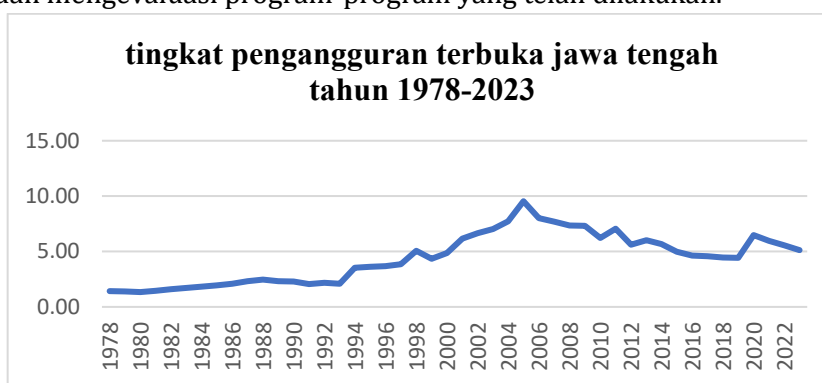
Gambar 3 ketimpangan Jawa tengah tahun 1978-2023

sumber: badan pusat statistik

Tingkat ketimpangan Jawa tengah menunjukkan tren kenaikan, peningkatan ketimpangan sering kali berdampak negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini terjadi karena ketimpangan umumnya didominasi oleh kelompok yang berpenghasilan rendah, dengan penghasilan yang rendah daya beli masyarakat juga akan terbatas sehingga hal ini dapat mengurangi potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Di sisi lain dengan meningkatnya ketimpangan porsi anggaran untuk bantuan sosial dan subsidi juga akan semakin meningkat guna mengatasi kemiskinan. Pajak dan retribusi tersebut dapat mendorong peningkatan PAD, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rachmawatie (2021) peningkatan PAD berpengaruh signifikan pada penurunan ketimpangan pendapatan begitu pula sebaliknya. Serta penelitian putri dan Natha (2014) PAD yang meningkat turut berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan. dalam penelitian Siburian (2019) ia mencoba meneliti kemungkinan adanya hubungan timbal balik antara desentralisasi fiskal dan ketimpangan pendapatan, hasilnya tidak ditemukan pengaruh ketimpangan terhadap kemandirian

keuangan daerah, namun dalam penelitian beramendi, Pablo (2003) desentralisasi memiliki konsekuensi distribusi yang bergantung pada struktur ketimpangan yang sudah ada sebelumnya.

Selain ketimpangan, pengangguran juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana individu yang telah tergolong ke dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan namun belum kunjung mendapatkan pekerjaan Sadono sukirno, (2006). Tingkat pengangguran terbuka dapat menjadi indikator kesehatan perekonomian daerah, tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan adanya perlambatan ekonomi. Dengan demikian pemerintah dapat merumuskan kebijakan secara lebih terarah dan mengevaluasi program-program yang telah dilakukan.

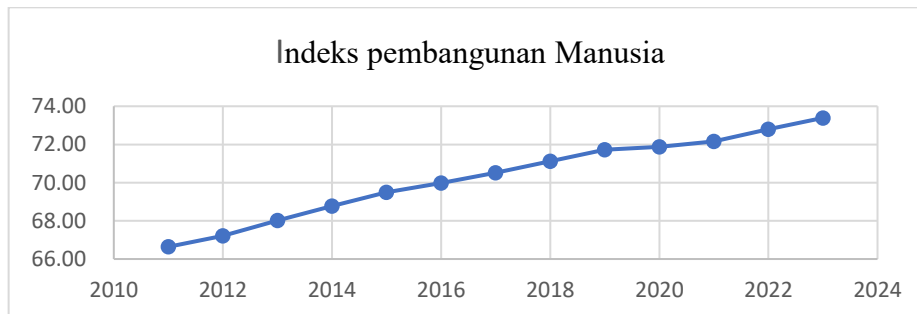


Gambar 4 tingkat pengangguran terbuka Jawa tengah tahun 1978-2023

sumber: badan pusat statistik

Tingkat pengangguran terbuka di Jawa tengah memang menunjukkan tren penurunan namun penurunan itu perlu untuk terus ditekan mengingat berdasarkan *internasional labour organization* Jawa tengah masih masuk dalam kategori daerah dengan tingkat pengangguran terbuka kategori sedang dengan persentase tingkat pengangguran terbuka rata-rata sebanyak 5,4% dari total angkatan kerja, untuk setidaknya 10 tahun terakhir. Dalam Penelitian jemna *et all.*(2013), Peningkatan angka pengangguran berpengaruh terhadap penurunan kemandirian keuangan daerah, dan begitu pula sebaliknya. Kemandirian keuangan daerah dapat tercapai ketika tingkat pengangguran di daerah tersebut berada di level rendah, ketika tingkat pengangguran rendah penerimaan pemerintah dari pajak penghasilan dapat meningkat, daya beli masyarakat yang lebih tinggi juga mendorong kenaikan penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPn). Peningkatan penerimaan pajak artinya meningkatkan pula pendapatan asli daerah (PAD) ketika rasio PAD lebih besar dari bantuan pihak eksternal dalam hal ini pemerintah pusat maka kemandirian keuangan daerah dapat tercapai, di lain sisi tingkat pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan belanja pemerintah terutama belanja pemerintah berupa bantuan sosial, subsidi dan pelatihan kerja, peningkatan belanja pemerintah yang tidak diiringi dengan pemasukan yang berimbang dapat menyebabkan defisit anggaran yang mana dapat mengurangi kemandirian keuangan daerah.

Selain ketimpangan dan tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat menggambarkan kondisi dimasyarakat. IPM adalah indikator-indikator gabungan untuk menilai hasil pembangunan kualitas hidup manusia. Wilayah dengan IPM tinggi umumnya memiliki populasi yang lebih sehat, lebih berpendidikan, dan memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik. Keadaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan memperluas potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai instrumen fiskal seperti pajak dan retribusi. Selain itu, IPM juga menjadi salah satu faktor dalam penentuan alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah, sehingga daerah dengan IPM yang rendah dapat mendapatkan perhatian khusus untuk mempercepat pengembangan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan IPM akan memacu kemandirian fiskal daerah.

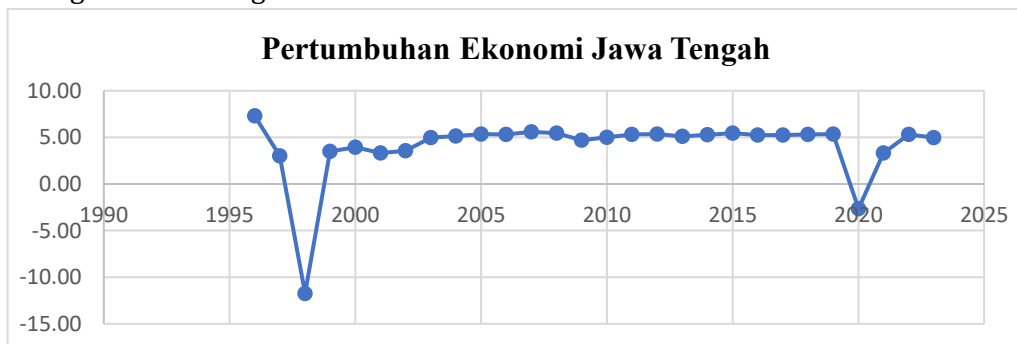


Gambar 5 indeks pembangunan manusia Jawa tengah tahun 2011-2023
sumber: badan pusat statistik

IPM di Jawa Tengah terus meningkat setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah pada periode yang sama. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) justru menunjukkan fluktuasi dan kecenderungan stagnan, bahkan sempat mengalami penurunan pada beberapa tahun tertentu seperti 2017. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif peningkatan kualitas SDM dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. IPM yang tinggi seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga memperkuat kemandirian fiskal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh suci wiji asih (2024) Namun, fakta menunjukkan bahwa peningkatan IPM belum secara konsisten mempengaruhi DDF. Ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang diasumsikan berperan dalam fluktuasi pada DDF. Demikian juga Penelitian Yakien *et all.*, (2024) menyatakan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Daerah dengan IPM yang tinggi cenderung memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik, yang dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dimana ini berpotensi untuk meningkatkan PAD.

Untuk mengetahui kondisi perekonomian di masyarakat indikator lain yang sering digunakan adalah pertumbuhan ekonomi menurut badan pusat statistik Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah dalam periode tertentu, yang biasanya diukur melalui perubahan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi barang dan jasa, yang selanjutnya berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah. Saat kegiatan ekonomi bertambah, pendapatan daerah juga akan mengalami kenaikan. Ini secara otomatis akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi elemen penting dalam menilai kemandirian fiskal. Dengan PAD yang kokoh, daerah tidak lagi terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga tingkat desentralisasi fiskal dapat meningkat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang konsisten juga mendorong masuknya investasi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kemampuan membeli masyarakat, yang secara keseluruhan memperkuat struktur keuangan daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan, tetapi juga berperan sebagai basis penting untuk meningkatkan kemandirian finansial daerah.



Gambar 6 pertumbuhan ekonomi Jawa tengah tahun 1996-2023

sumber: badan pusat statistik

Pertumbuhan ekonomi Jawa tengah cukup sensitif dengan perubahan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun internasional. Dalam penelitian Ony Widilestariningtyas (2020) dan Renny Nur'ainy, Desfitrina, Rooswhan Budi Utomo (2013) menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah, dalam penelitian tersebut terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah. sehingga meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menunjukkan daya pulih yang relatif cepat setelah mengalami guncangan, grafik historis memperlihatkan bahwa perekonomian daerah ini cukup sensitif terhadap perubahan yang terjadi pada skala nasional maupun global, seperti krisis moneter 1998 dan pandemi COVID-19 pada 2020. Sensitivitas tersebut menunjukkan kemungkinan adanya ketergantungan yang cukup besar terhadap dinamika fiskal nasional, termasuk dalam hal pembiayaan pembangunan melalui transfer dana dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini berpotensi mengindikasikan bahwa struktur fiskal daerah belum sepenuhnya mandiri, sehingga ketika terjadi gangguan ekonomi nasional, fiskal daerah juga ikut terguncang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas desentralisasi fiskal dan sejauh mana pertumbuhan ekonomi daerah benar-benar berkontribusi terhadap kemandirian keuangan tanpa campur tangan dominan dari pusat. pengujian terhadap variabel pertumbuhan ekonomi dapat memberikan

gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal dan kapasitas daerah dalam mengelola pembangunan tanpa ketergantungan penuh pada pemerintah pusat.

Provinsi Jawa Tengah menunjukkan sejumlah indikator pembangunan yang positif, seperti penurunan tingkat pengangguran sejak 2005 dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2010 hingga 2023, beberapa fenomena menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hasil pembangunan dan kinerja kemandirian fiskal daerah. Sejak 2012, tingkat kemandirian keuangan daerah cenderung menurun, yang bertepatan dengan peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat, menandakan potensi ketergantungan fiskal yang tinggi. Berdasarkan teori desentralisasi oleh musgrave terdapat tiga fungsi pemerintah yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Ketimpangan pendapatan di Jawa tengah menunjukkan peningkatan sejak tahun 2008, mencerminkan kemungkinan adanya masalah dalam fungsi distribusi pemerintah daerah, begitu pun dengan tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah masih berada pada kategori sedang (rata-rata 5,4%), mengindikasikan tantangan dalam fungsi alokasi tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah cenderung stabil, namun sangat rentan terhadap guncangan nasional, seperti krisis 1998 dan pandemi 2020. Ini menunjukkan bahwa fungsi stabilisasi fiskal belum optimal dijalankan di tingkat daerah. dengan demikian diperlukan penelitian lebih lanjut terkait kemandirian keuangan daerah di Jawa tengah. Oleh karena itu skripsi ini mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif, dengan variabel dependen derajat desentralisasi fiskal, dan variabel independen ketimpangan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi, Untuk menentukan nilai derajat desentralisasi fiskal, penelitian ini menggunakan persamaan berikut:

$$DDF = \left(\frac{\text{pendapatan asli daerah (PAD)}}{\text{total pendapatan daerah}} \right) \times 100\%$$

Penelitian ini menggunakan metode analisis data VECM (*vector error corection model*) yang berguna untuk mengetahui hubungan jangka pendek maupun jangka panjang antar variabel. Estimasi data dan pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program *software* E-views 12 dengan observasi data sejumlah 28. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari badan pusat statistik selama periode 1996-2023 yang berlokasi jawa tengah. Berikut merupakan definisi operasional variabel:

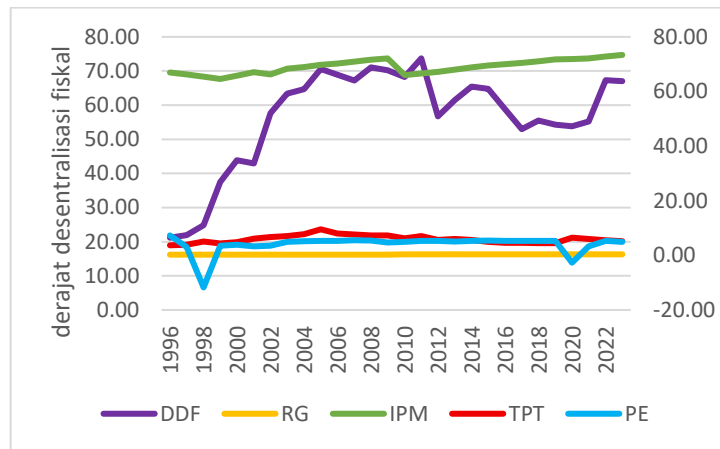
No.	variabel	Definisi Operasional	Dimensi Ukur	sumber
-----	----------	----------------------	--------------	--------

1.	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan	persen	Badan Pusat Statistik (BPS)
2.	Ketimpangan Pendapatan (KETIMPANGAN)	Tidak merata atau tidak seimbang nya pendapatan antar masyarakat disuatu daerah	Skala 0-1	Badan Pusat Statistik (BPS)
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan	persen	Badan Pusat Statistik (BPS)
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	diukur melalui 3 komponen yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak	poin	Badan Pusat Statistik (BPS)
5.	Pertumbuhan Ekonomi (PE)	peningkatan nilai dan jumlah produksi barang serta jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu.	persen	Badan Pusat Statistik (BPS)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran kemandirian keuangan jawa tengah

Kemandirian keuangan daerah di Jawa tengah dapat digambarkan melalui derajat desentralisasi fiskal (DDF). Grafik berikut menampilkan perkembangan derajat desentralisasi fiskal, ketimpangan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 1996 hingga 2023. Analisis terhadap kelima variabel dapat memberikan gambaran umum mengenai dinamika hubungan fiskal daerah dengan ketimpangan, kesejahteraan masyarakat, dan kondisi pasar tenaga kerja.



Gambar 7 kemandirian keuangan daerah, ketimpangan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi 1996-2023
sumber: badan pusat statistik

Derajat desentralisasi fiskal (DDF) menunjukkan tren meningkat signifikan sejak awal periode hingga sekitar tahun 2010, dengan lonjakan tajam dari kisaran 20 ke atas 70, sebelum kemudian mengalami fluktuasi dan penurunan hingga tahun 2020, dan kembali naik mendekati 70 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah terutama pada awal era otonomi, meskipun sempat mengalami penurunan pada pertengahan dekade berikutnya. KETIMPANGAN berada dalam kisaran sempit sekitar 0,30–0,40 sepanjang periode pengamatan dan menunjukkan tren yang relatif stabil. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi, tidak terlihat adanya penurunan signifikan meskipun DDF sempat mencapai angka tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu yang diamati, ketimpangan pendapatan tidak mengalami perbaikan yang berarti. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bergerak fluktuatif, dengan penurunan bertahap setelah tahun 2005 hingga mendekati angka 5 persen, namun menunjukkan lonjakan pada tahun 2020 yang dapat dikaitkan dengan dampak pandemi, dan kembali menurun setelahnya. Pergerakan tingkat pengangguran terbuka tampak tidak selaras secara langsung dengan pola derajat desentralisasi fiskal.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperlihatkan tren yang meningkat secara konsisten dari awal periode hingga 2023. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat, terlepas dari fluktuasi pada variabel ekonomi lainnya. Pertumbuhan ekonomi (PE) juga mengalami fluktuasi selama periode 1996–2023, dengan penurunan tajam pada tahun 1998 dan 2020 yang mencerminkan dampak krisis ekonomi dan pandemi COVID-19. Di luar periode tersebut, pertumbuhan cenderung stabil dalam kisaran 4–6 persen per tahun. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui desentralisasi tidak secara otomatis diikuti oleh perbaikan dalam ketimpangan pendapatan maupun penurunan tingkat pengangguran. Sementara itu, IPM terus mengalami perbaikan, menunjukkan bahwa dimensi pembangunan manusia tetap mengalami kemajuan, meskipun

pertumbuhan ekonomi dan variabel lainnya menunjukkan dinamika yang lebih fluktuatif.

VECM (vector error corection model)

1. Uji stasioneritas

Dalam penelitian ini digunakan analisis *unit root test* untuk mengetahui stasioneritas data. Dalam analisis *unit root test* digunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) dengan taraf nyata 5% (0,05), jika nilai ADF lebih besar dari nilai-nilai kritis mackinnon maka dapat dikatakan terdapat stasioneritas pada data tersebut. Uji stasioneritas diperlukan untuk memastikan bahwa variabel yang digunakan memiliki sifat yang sama yaitu stasioner pada ordo yang sama.

Table 2 Hasil uji stasioneritas tingkat level

Variabel	Nilai ADF	Nilai Kritis MacKinnon	Prob.	Ket.
DDF	-2.505928	-2.976263	0.1252	Tidak stasioner
KETIMPANGAN	-0.779209	-2.976263	0.8090	Tidak stasioner
TPT	-2.030815	-2.976263	0.2727	Tidak stasioner
IPM	-1.047420	-2.976263	0.7211	Tidak stasioner
PE	-4.487681	-2.976263	0.0015	Stasioner

Sumber: output views (2025)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel DDF, KETIMPANGAN, TPT IPM tidak stasioner ditingkat level, Karena variabel tidak stasioner di tingkat level maka perlu dilakukannya transformasi data pada tingkat *first difference* ataupun *second difference*.

Table 3 hasil uji stasioneritas tingkat *first difference*

Variabel	Nilai ADF	Nilai Kritis MacKinnon	Prob.	Ket.
DDF	-5.042353	-2.981038	0.0004	stasioner
KETIMPANGAN	-4.832051	-2.981038	0.0007	stasioner
TPT	-5.788795	-2.981038	0.0001	stasioner
IPM	-5.105250	-2.981038	0.0003	stasioner
PE	-4.373111	-2.981038	0.0023	stasioner

Sumber: output views (2025)

Hasil uji stasioneritas pada tingkat *first difference* seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas menunjukkan baik variabel DDF, KETIMPANGAN, TPT, IPM, dan PE seluruhnya stasioner karena seluruh variabel memiliki nilai ADF > nilai kritis mac kinnon 5%, dan prob. < 0,05 (5%)

2. Uji lag optimum

Uji lag optimum berguna untuk menunjukkan seberapa lama raksi suatu variabel terhadap variabel lain dan untuk menghilangkan masalah autokorelasi dalam sebuah sistem VAR (Syauqi et all., 2014) Untuk menentukan lag optimum kriteria yang dipilih adalah *Akaike information ciration (AIC)* yaitu dengan memilih model dengan nilai AIC terendah

Table 4 hasil uji lag optimum

Lag	Logl	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-146.9731	NA	0.131161	12.15785	12.40162*	12.22546*
1	-128.1323	28.63793	0.225134	12.65059	14.11324	13.05626
2	-90.25754	42.41976*	0.105771*	11.62060*	14.30213	12.36434

Sumber: output views (2025)

Pada tabel di atas menunjukkan nilai AIC terendah berada di lag 2. Hal ini juga turut di dukung oleh LR dan FPE yang juga memilih lag 2. Pemilihan lag 2 dapat meningkatkan akurasi terkait estimasi hubungan jangka panjang dan jangka pendek antar variabel.

3. Uji stabilitas VAR

Model VAR dapat dianggap stabil jika semua roots-nya memiliki nilai modulus yang berada dalam lingkaran unit, yaitu kurang dari 1 (gujarati, 2004).

Table 5 Hasil Uji Stabilitas VAR

Root	Modulus
0.778324	0.778324
-0.319170 - 0.677353i	0.748783
-0.319170 + 0.677353i	0.748783
-0.036831 - 0.745331i	0.746240
-0.036831 + 0.745331i	0.746240
0.472131 - 0.529443i	0.709378
0.472131 + 0.529443i	0.709378
-0.700522	0.700522
-0.495368 - 0.489756i	0.696599
-0.495368 + 0.489756i	0.696599

Sumber: output views (2025)

Dala uji stabilitas VAR semua nilai modulus berada kurang dari 1, maka dapat dikatakan model VAR stabil,

4. Uji kointegrasi

Uji kointegrasi dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan jangka panjang antar variabel. suatu model di katakan memiliki kointegrasi jika nilai *trace statistics* > nilai *critical value* dengan nilai prob. < 0,05.

Table 6 hasil uji kointegrasi

Hypothesized No. of CE(s)	Trace statistic	0.05 Critical value	Prob.
None *	141.9843	69.81889	0.0000
At most 1 *	87.16814	47.85613	0.0000
At most 2 *	44.97053	29.79707	0.0005
At most 3 *	17.31286	15.49471	0.0263
At most 4 *	4.204531	3.841465	0.0403

Sumber: output views (2025)

Dari hasil uji kointegrasi dapat dilihat bahwa nilai trace statistics > nilai critical value dan nilai prob. < 0,05 Oleh karena itu, terdapat hubungan kointegrasi, sehingga model memenuhi syarat untuk pemodelan VECM dan dianalisis lebih lanjut.

5. Vector error corelation model (VECM)

Dalam analisis VECM akan diketahui hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara variabel dependen derajat desentralisasi fiskal dan variabel independen ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan hasil analisis VECM dalam jangka panjang dan jangka pendek:

Table 7 hasil uji VECM jangka panjang

variabel	koefisien	Std.error	T statistik	T tabel	keterangan
C	-0.433983				
D(KETIMPANGAN (-1))	-18.02110	20.7410	[-0.86886]	2,06866	Tidak signifikan
D(TPT(-1))	-6.238235	0.28753	[-21.6957]	2,06866	signifikan
D(IPM(-1))	1.208226	0.29942	[4.03523]	2,06866	signifikan
D(PE(-1))	-2.091000	0.11491	[-18.1975]	2,06866	signifikan

Sumber: output eviews (2025)

Berikut merupakan hasil analisis jangka panjang dari hasil estimasi VECM:

1. Ketimpangan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal dalam jangka panjang, dimana nilai t-statistik (-0.86886) < t-tabel (2,01808).
2. Tingkat pengangguran terbuka dalam jangka panjang memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal, ini sesuai dengan estimasi pada t-statistik (-21.6957) > t-tabel (2,01808)
3. Indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal dalam jangka panjang dimana t-statistik 4.03523 > t-tabel 2,06866
4. negatif signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal dalam jangka panjang dimana t-statistik -18.1975 > t-tabel 2,06866

Table 8 hasil uji VECM jangka pendek

variabel	koefisien	Std.Error	T statistik	T tabel	keterangan
CoinEq1	-1.181888	0.50078	[-2.36010]	2,06866	signifikan
D(DDF(-1),2)	0.243146	0.34742	[0.69986]	2,06866	Tidak signifikan
D(DDF(-2),2)	0.223190	0.28458	[0.78427]	2,06866	Tidak signifikan
D(KETIMPANGAN(-1),2)	8.167378	73.7467	[0.11075]	2,06866	Tidak signifikan
D(KETIMPANGAN(-2),2)	-47.04811	62.8114	[-0.74904]	2,06866	Tidak signifikan

D(TPT(-1),2)	-4.525347	2.43168	[-1.86100]	2,06866	Tidak signifikan
D(TPT(-2),2)	-2.633165	2.17547	[-1.21039]	2,06866	Tidak signifikan
D(IPM(-1),2)	-0.226980	0.61599	[-0.36848]	2,06866	Tidak signifikan
D(IPM(-2),2)	2.136075	0.69126	[3.09012]	2,06866	signifikan
D(PE(-1),2)	-1.342535	0.64146	[-2.09293]	2,06866	signifikan
D(PE(-2),2)	-0.810798	0.34604	[-2.34307]	2,06866	signifikan
C	0.227637	0.96135	[0.23679]	2,06866	

Sumber: *output views (2025)*

Berikut merupakan analisis jangka pendek pada lag 1 maupun lag 2 berdasarkan hasil estimasi VECM

1. Pada lag 1 Derajat Desentralisasi Fiskal memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal, dimana nilai t-statistik (0.69986) < t-tabel (2,01808). Demikian juga pada lag 2 Derajat Desentralisasi Fiskal memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal, dimana nilai t-statistik (0.78427) < t-tabel (2,01808).
2. Pada lag 1 ketimpangan memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal, dimana nilai t-statistik (0.11075) < t-tabel (2,01808).. Demikian juga pada lag 2 ketimpangan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal, dimana nilai t-statistik (-0.74904) < t-tabel (2,01808).
3. Pada lag 1 tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal, dimana nilai t-statistik (-1.86100) < t-tabel (2,01808). Demikian juga pada lag 2 tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal, dimana nilai t-statistik (-1.21039) < t-tabel (2,01808).
4. Pada lag 1 IPM memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal, dimana nilai t-statistik (-0.36848) < t-tabel (2,01808). namun pada lag 2 IPM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal, dimana nilai t-statistik (3.09012) > t-tabel (2,01808) dengan koefisien 2.136075 .
5. Pada lag 1 pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal, dimana t-statistik -2.09293 > t-tabel 2,06866, dengan koefisien -1.342535. Dan pada lag 2 pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal, dimana t-statistik -2.09293 > t-tabel 2,06866, dengan koefisien -0.810798

Secara keseluruhan, dalam jangka pendek perubahan DDF dipengaruhi secara signifikan oleh dua variabel yaitu PE pada periode sekarang maupun dua periode sebelumnya dan IPM pada dua periode sebelumnya. Sedangkan untuk variabel

KETIMPANGAN, TPT dan DDF sendiri baik pada periode sekarang maupun dua periode sebelumnya tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap perubahan DDF dalam model ini.

Table 9 R-Squared

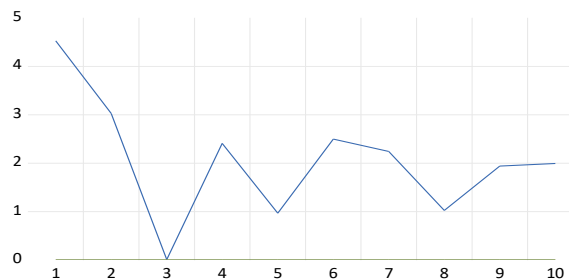
R-squared	0.877693
Adj. R-squared	0.765578

sumber: output eviews (2025)

Berdasarkan pada hasil uji VECM di atas, variabel, Ketimpangan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi, mampu menjelaskan variabel Derajat Desentralisasi Fiskal sebesar 87,7%. Artinya 87,7% perubahan pada derajat desentralisasi fiskal dapat di jelaskan oleh ketimpangan , tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi, dan 12,3 % sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dalam model, Adj. R-squared menunjukkan angka 0.765578 artinya 76% variasi dalam variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel dependen. Sisanya, sekitar 23,44%, dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

6. Impulse respond function (IRF)

Impulse respond function atau IRF digunakan untuk mengukur serta menggambarkan dampak guncangan yang terjadi pada suatu variabel terhadap variabel lain dalam model dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk variabel tersebut kembali ke titik keseimbangannya.

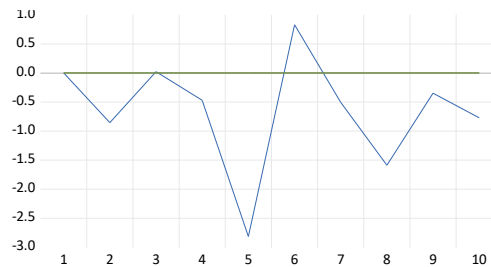


Gambar 8 respons (DDF) terhadap shock pada (DDF)

sumber: output eviews (2025)

Gambar menunjukkan respons D(DDF) terhadap shock yang diberikan pada D(DDF) itu sendiri. Pada periode pertama DDF merespons dengan sangat signifikan terkait shock pada DDF itu sendiri dengan nilai kenaikan sekitar 4,5 poin, artinya shock pada DDF di awal langsung memberikan respons yang tinggi dan positif terhadap DDF itu sendiri, kemudian di periode ke 2 respons mulai menunjukkan penurunan, ini menandakan efek kejutan (shock) mulai melemah, ini berlanjut hingga periode ke 3, dengan penurunan yang sangat drastis yang menunjukkan efek kejutan (shock) mulai menghilang, namun di periode ke 4, efeknya kembali menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi, dan terus berfluktuasi hingga periode ke 8 dan di periode ke 9 hingga 10 efek kejutan (shock) mulai stabil di angka 2 untuk kembali ke

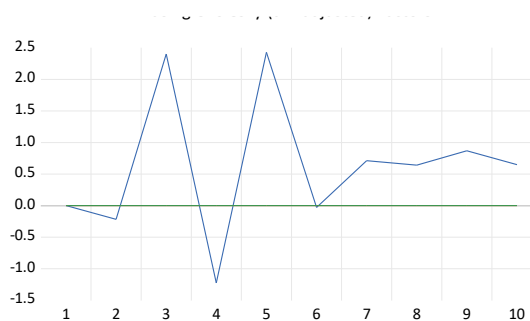
keseimbangan jangka panjang. Hal ini menandakan DDF cukup sensitif terhadap perubahan pada dirinya sendiri dalam jangka pendek, namun dalam jangka menengah dan panjang efeknya cenderung stabil.



Gambar 9 respons derajat desentralisasi fiskal (DDF) terhadap guncangan pada ketimpangan

sumber: output eviews (2025)

Gambar menunjukkan respons dari DDF terhadap guncangan (shock) pada variabel Ketimpangan, pada periode pertama DDF langsung menunjukkan respons negatif terhadap guncangan pada ketimpangan, ini berlanjut hingga periode ke 2 mencapai titik sekitar -0,9. Respons mulai menunjukkan pergerakan menuju arah positif pada periode ke 3 namun kembali menurun cukup drastis ke titik -3,8 pada periode ke 5. Di periode ke 6 respons DDF berbalik menjadi positif di angka 0,7 sebelum kembali menurun di periode ke 8 dan berfluktuasi pada angka sekitar 0 pada periode ke 9 hingga 10. Artinya guncangan (shock) pada ketimpangan berdampak negatif terhadap derajat desentralisasi fiskal terutama dalam jangka menengah.

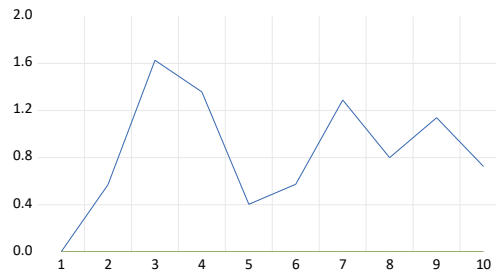


Gambar 10 respons (DDF) terhadap inovasi (TPT)

sumber: output eviews (2025)

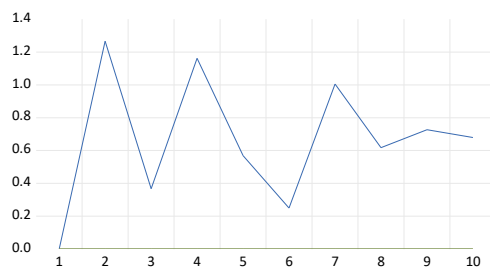
Gambar diatas menunjukkan respons dari DDF terhadap guncangan (shock) pada TPT, pada periode awal guncangan (shock) pada TPT tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap DDF, namun di periode ke 3 respons menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan ke arah positif, di periode ke 4 respons menunjukkan penurunan yang drastis ke arah negatif secara signifikan, dan periode ke 5 respons kembali naik tajam ke level positif, respons mulai menunjukkan stabilitas di periode ke 6 hingga ke 10. Respons yang demikian ini menunjukkan, guncangan (shock) pada

TPT memberikan efek fluktuatif yang sangat signifikan terhadap DDF terutama pada periode pertengahan.



Gambar 11 respons derajat desentralisasi fiskal (DDF) terhadap inovasi tingkat pengangguran terbuka (IPM)
sumber: output eviews (2025)

Gambar diatas menunjukkan respons dari DDF terhadap guncangan (shock) pada IPM, pada periode awal respons DDF meningkat tajam hingga ke titik 1,6 pada periode ke 3, ini mengindikasikan peningkatan IPM dalam jangka pendek dapat mendorong peningkatan DDF, namun di periode ke 4 hingga ke 5 respons menurun tajam hingga di titik 0,4 sebelum kembali mengalami peningkatan di periode ke 6. Pada periode ke 7 hingga ke 10 respons DDF terhadap guncangan (shock) pada IPM cenderung berfluktuasi sebelum kembali ke titik keseimbangannya.



Gambar 12 respons derajat desentralisasi fiskal (DDF) terhadap inovasi tingkat pengangguran terbuka (PE)
sumber: output eviews (2025)

Gambar diatas menunjukkan respons dari DDF terhadap guncangan (shock) pada IPM, pada periode awal respons DDF langsung menunjukkan peningkatan positif yang sangat signifikan hingga ke titik 1,2 pada periode ke 2, di periode ke 3 hingga ke 6 guncangan berfluktuasi secara signifikan dan di periode ke 7 hingga ke 10 responsnya mulai menunjukkan stabilitas. Hal ini menunjukkan PE berpengaruh positif terhadap DDF terutama pada awal periode.

7. Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)

Variance decomposition atau forecast error Variance decomposition menunjukkan seberapa besar pengaruh perubahan suatu variabel dapat menjelaskan fluktuasi pada dirinya sendiri maupun variabel lainnya.

Table 10 hasil uji FEVD

Variance Decomposition of D(DDF):						
Period	S.E.	D(DDF)	D(KETIMPANGAN)	D(TPT)	D(IPM)	D(PE)
1	4.526183	100.0000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2	5.689362	91.63758	2.254458	0.147217	1.003488	4.957262
3	6.396626	72.49359	1.784638	14.21401	7.257032	4.250729
4	7.186000	68.68042	1.841157	14.17334	9.319709	5.985373
5	8.178274	54.42523	13.25901	19.77298	7.438789	5.103996
6	8.614367	57.46414	12.88099	17.82282	7.147822	4.684218
7	9.092002	57.65948	11.87242	16.61324	8.426302	5.428563
8	9.362868	55.56449	14.07088	16.13571	8.674584	5.554341
9	9.701988	55.74460	13.23332	15.83129	9.456752	5.734030
10	10.00559	56.38728	13.03795	15.30551	9.416660	5.852604

sumber: output views (2025)

Berdasarkan hasil output forecast error Variance decomposition di atas, dapat diketahui bahwa pada periode pertama DDF sepenuhnya menjelaskan dirinya sendiri (100%), hal ini terjadi karena belum adanya efek dari variabel ketimpangan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang terakumulasi. Pada periode ke dua kontribusi variabel lain mulai muncul dimana variabel ketimpangan dapat menjelaskan sekitar 2,25 %, TPT 0,14%, IPM 1%, dan PE 4,95% hal ini menunjukkan efek dari kedua variabel mulai terasa meskipun kecil. Kontribusi D(DDF) dalam memengaruhi D(DDF) mulai menunjukkan penurunan secara signifikan di periode ke 3 (72 49 %) ini menunjukkan variabel lain semakin berkontribusi terhadap fluktuasi. Di periode ke 3 pula variabel ketimpangan dapat menjelaskan sekitar 1,78 %, TPT 14,21%, IPM 7,25%, dan PE 4,25% fluktuasi pada D(DDF). Kontribusi D(DDF) dalam memengaruhi D(DDF) sendiri di periode ke 4 dan 5 terus menunjukkan penurunan, namun angkanya kembali meningkat di periode ke 6 meski tidak signifikan, selanjutnya di periode 7 hingga 10 terjadi fluktuasi yang relatif stabil dalam jangka panjang.

Ketimpangan pendapatan D(KETIMPANGAN) memiliki pengaruh kecil pada periode awal tetapi kontribusinya secara bertahap menunjukkan peningkatan dalam jangka Panjang meski tidak terlalu signifikan, yaitu sekitar 13,03% pada periode ke 10. Demikian juga dengan TPT pada periode awal kontribusinya sangat kecil jika dibandingkan dengan variabel lain dalam model, namun seiring waktu terjadi peningkatan meski tidak cukup signifikan sebelum akhirnya stabil diangka 15,30% pada periode ke 10. Demikian juga dengan IPM di awal periode kontribusi IPM terhadap DDF hanya sebesar 1% namun kontribusinya semakin meningkat dalam jangka panjang hingga mencapai angka 9,41% pada periode ke 10. Sementara itu PE di awal periode berkontribusi sebesar 4,95% terhadap DDF, dalam jangka panjang

kontribusinya tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan cenderung kecil, pada periode ke 10 kontribusi PE terhadap DDF hanya sebesar 5,85%.

Model persamaan *Vector Error Correction Model (VECM)*

Berdasarkan pemilihan lag optimal sesuai spesifikasi model, telah ditetapkan model VECM terbaik yang digunakan untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah. Berikut merupakan model VECM yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$\begin{aligned} \Delta DDF = & -1,1819 \text{ ECT} + 0,2431. \Delta DDF_{t-1} + 0,2232. \Delta DDF_{t-2} + 8,1674. \\ & \Delta \text{KETIMPANGAN}_{t-1} - 47,0481. \Delta \text{KETIMPANGAN}_{t-2} - 4,5253. \Delta \text{TPT}_{t-1} - 2,6332. \\ & \Delta \text{TPT}_{t-2} - 0,2270. \Delta \text{IPM}_{t-1} + 2,1361. \Delta \text{IPM}_{t-2} - 1,3425. \Delta \text{PE}_{t-1} - 0,8108. \\ & \Delta \text{PE}_{t-2} - 0,4340 - 1.1819 \text{ DDF}_t - 18.0211 \text{ RG}_t - 6.2382 \text{ TPT}_t + 1.2082 \text{ IPM}_t - \\ & 2.0910 \text{ PE}_t \end{aligned}$$

Keterangan:

Δ : *First difference* dari setiap data pada variabel penelitian

ECT : error dari persamaan regresi antara Y dan X pada lag 1

DDF : kemandirian keuangan daerah (derajat desentralisasi fiskal)

KETIMPANGAN: ketimpangan pendapatan

TPT : tingkat pengangguran terbuka

IPM : indeks pembangunan manusia

PE : pertumbuhan ekonomi

Melalui model tersebut dapat diketahui, nilai absolut dari koefisien ECT (*error correction term*) yaitu -1,1819. Nilai ECT untuk variabel DDF ini bertanda negatif dan signifikan artinya model yang digunakan valid yang menunjukkan adanya mekanisme koreksi menuju keseimbangan jangka panjang. Nilai koefisien ECT -1,1819 dapat diartikan bahwa, sekitar 118,19% selisih antara nilai aktual derajat desentralisasi fiskal dalam jangka pendek dan nilai keseimbangan derajat desentralisasi fiskal dalam jangka panjang akan terkoreksi setiap periode, namun karena nilainya melebihi 100% ini menunjukkan adanya penyesuaian yang sangat cepat dan berlebihan atau *overshooting, overshooting* adalah fenomena dimana suatu variabel bereaksi secara berlebihan atau melampaui tingkat keseimbangan jangka panjangnya setelah terjadi guncangan, sebelum akhirnya kembali stabil pada keseimbangan baru. dikenal sebagai konvergensi osilasi, di mana variabel-variabel akan berayun bolak-balik di sekitar titik keseimbangan jangka panjangnya sebelum akhirnya stabil.

Menurut lütkepohl, (2005) sistem VECM dapat tetap stabil meskipun koefisien penyesuaian (ECT) memiliki nilai absolut lebih besar dari 1 atau dalam penelitian ini -1,18, selama nilai modulusnya <1, dalam penelitian ini berdasarkan uji stabilitas VAR diketahui nilai modulus berada di angka <1 artinya model ini valid dan stabil secara teoritis. Koefisien ECT yang secara absolut melebihi 1 dalam konteks model yang stabil mengindikasikan adanya penyesuaian yang sangat cepat, sering kali bersifat *osilatif (oscillatory convergence)*

Pengaruh ketimpangan terhadap kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan estimasi VECM diketahui bahwa dalam jangka panjang Ketimpangan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal, dan pengaruh positif tidak signifikan pada lag 1 serta negatif tidak signifikan pada lag 2 dalam jangka pendek. Hal ini di buktikan dengan nilai t-statistik pada jangka panjang yaitu -0.86886 dan t-statistic jangka pendek pada lag 1 yaitu 0.11075 dan lag 2 yaitu -0.74904, t-statistic baik pada jangka Panjang maupun jangka pendek memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel yaitu 2,06866. Artinya tidak terdapat pengaruh jangka panjang maupun jangka pendek antara ketimpangan dan derajat desentralisasi fiskal Jawa tengah pada periode 1996-2023. Hal ini menolak hipotesis penelitian dimana terdapat pengaruh antara variabel ketimpangan terhadap derajat desentralisasi fiskal Jawa tengah dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Sebagaimana di Jawa tengah, Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar bagi produk domestik regional bruto (PDRB), menyumbang sekitar 30% PDRB Jawa tengah, hal ini menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui nilai tambah yang di hasilkan seperti proses transformasi barang mentah menjadi barang jadi, penyerapan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Namun peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa tengah juga diiringi dengan peningkatan ketimpangan dimasyarakatnya. Tahun 2023 perekonomian Jawa tengah tumbuh sebesar 4,98% (year-on-year) dan ketimpangan juga menunjukkan peningkatan melalui ketimpangan yang mengalami peningkatan 0,003 poin dibandingkan tahun 2022.

Di sisi lain sektor industri di Jawa tengah mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah melalui pajak daerah, retribusi, peningkatan aktivitas ekonomi lokal dan lain sebagainya di mana hal ini mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, hal ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal oleh Musgrave, (1959). Dalam fungsi alokasi, kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri menciptakan sumber pembiayaan yang dapat di pergunakan untuk operasional daerahnya tanpa bergantung terhadap dana transfer pemerintah pusat. Tahun 2023 PAD Jawa tengah naik 747.989.000.000 dibandingkan dengan tahun 2022. Dengan Realisasi Penerimaan Pajak Provinsi Jawa Tengah Menurut Klasifikasi Lapangan Usaha masih di dominasi oleh industri pengolahan.

Sektor ekonomi yang kuat di suatu daerah dapat mendorong PDRB dan PAD suatu daerah, PDRB yang meningkat dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus ketimpangan jika tidak diimbangi dengan pemerataan pendapatan, namun sektor ekonomi yang kuat juga dapat berkontribusi pada peningkatan PAD dimana ini dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah, Dengan kata lain, ketimpangan dan kemandirian fiskal dapat meningkat secara bersamaan tanpa saling memengaruhi secara langsung, karena keduanya dipengaruhi oleh faktor yang berbeda: ketimpangan oleh distribusi pendapatan, dan kemandirian oleh kapasitas fiskal daerah.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Matondang Elsa Siburian (2019), (2021) dimana dalam penelitian tersebut tidak ditemukan pengaruh ketimpangan terhadap desentralisasi. Namun Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan

penelitian yang dilakukan oleh Hung & Thanh (2022) dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan per kapita akan menyebabkan peningkatan desentralisasi fiskal.

Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan estimasi VECM diketahui bahwa, dalam jangka panjang tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal, namun berpengaruh tidak signifikan baik pada lag 1 dan lag 2 dalam jangka pendek. dalam jangka panjang, tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dengan koefisien sebesar - 6.238235. hasil ini menunjukkan bahwa, ketika terjadi peningkatan tingkat pengangguran sebesar 1%, maka akan mengakibatkan penurunan kemandirian keuangan daerah sebesar 6, 238% dengan asumsi *ceteris paribus*. Berbeda dengan dalam jangka pendek, tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dalam jangka pendek tingkat pengangguran terbuka tidak terbukti secara statistik memberikan dampak pada kemandirian keuangan daerah. Atinya terdapat pengaruh jangka panjang namun tidak ditemukan pengaruh jangka pendek antara ketimpangan dan derajat desentralisasi fiskal Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian dimana terdapat pengaruh antara variabel tingkat pengangguran terbuka terhadap derajat desentralisasi fiskal Jawa tengah dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh, Mihaela Onofrei, Elena Cigu (2013) dimana dalam penelitian tersebut pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap otonomi keuangan daerah. di Jawa tengah dalam jangka pendek pengangguran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah karena, dalam jangka pendek pengangguran umumnya di pengaruhi oleh fluktuasi ekonomi dan proses transisi tenaga kerja (mankew, 2012). Sehingga perubahan yang terjadi terhadap PAD tidak langsung terasa, hal ini dikarenakan pajak dan retribusi tidak langsung menyesuaikan dalam jangka pendek dan pemerintah masih dapat menjaga stabilitas anggaran dengan menyesuaikan belanja jangka pendek

Dalam jangka panjang, peningkatan pengangguran secara terus menerus dapat berdampak pada kemandirian keuangan daerah, hal ini karena, ketika banyak penduduk tidak bekerja, maka daya beli akan menurun, konsumsi menjadi lesu dan sektor usaha tidak berkembang. Akibatnya pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak, retribusi dan lainnya akan menurun dan meningkatkan beban subsidi karena banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, akibatnya kemandirian keuangan daerah dapat terganggu karena pendapatan asli daerah yang minim dan memperbesar ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat, sehingga menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan estimasi VECM diketahui bahwa dalam jangka panjang maupun jangka pendek indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal, namun dalam jangka pendek indeks pembangunan manusia hanya berpengaruh pada lag 2 dengan koefisien 2.136075, hal ini menunjukkan, ketika terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia pada 2 tahun sebelumnya sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan kemandirian keuangan daerah sebesar 2,136 % dengan asumsi *ceteris paribus*. Begitu pula dalam jangka panjang, indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan koefisien 1.208226, dimana Ketika terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 1% maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat sebesar 1.208% dengan asumsi *ceteris paribus*. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian dimana terdapat pengaruh antara variabel indeks pembangunan manusia terhadap derajat desentralisasi fiskal Jawa tengah dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Penelitian ini Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tabroni, Roni (2020) serta Muhammad Giri Ainul Yaqien, Hady Sutjipto, Deris Desmawan, Muhammad Nasim Harahap (2024), dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. berbeda dengan hasil penelitian menurut Dedy Harianto Hutasoit, Jelin Rachel Stephoney Saragih, Jesica Septi Leony Simanungkalit, Ros Juliana Lubis, Putri Kemala Dewi Lubis. (2025) tidak di temukan hubungan signifikan antara IPM kemandirian keuangan daerah.

Dalam jangka pendek, peningkatan IPM mencerminkan perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, peningkatan ini dapat memberikan efek langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal, di Jawa tengah peningkatan IPM diiringi dengan peningkatan UMKM yang mana ini dapat mencerminkan aktivitas ekonomi lokal, ada setidaknya 173.431 pelaku usaha di Jawa tengah pada tahun 2021 dan angka ini naik menjadi 178,821 pada tahun 2022, Hal ini berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, sehingga menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam periode waktu yang relatif singkat.

Dalam jangka panjang, peningkatan IPM diiringi dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah, dalam teori modal manusia kesehatan dan pendidikan merupakan modal yang dapat menjadi investasi untuk meningkatkan produktivitas. Dalam jangka panjang peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan maupun kehidupan masyarakat dapat menjadi fondasi yang kuat untuk menciptakan inovasi yang mana dapat mendorong aktivitas ekonomi sehingga berdampak baik ke pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan asli daerah, pendapatan daerah yang tinggi dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dan menciptakan kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan estimasi VECM diketahui bahwa dalam jangka panjang maupun angka pendek pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal, dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dengan koefisien sebesar -2.091000, penelitian ini menunjukkan ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka kemandirian keuangan daerah akan turun sebesar 2,091% dengan asumsi *ceteris paribus*, dalam jangka pendek baik pada lag 1 maupun lag 2, pada lag 1 pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan koefisien -1.342535, Ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan mengakibatkan penurunan kemandirian keuangan daerah sebesar 1,342% dengan asumsi *ceteris paribus*, demikian pula pada lag 2 pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan koefisien -0.810798, Ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka akan mengakibatkan penurunan kemandirian keuangan daerah sebesar 0,81% dengan asumsi *ceteris paribus*. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian dimana terdapat pengaruh antara variabel pertumbuhan ekonomi terhadap derajat desentralisasi fiskal Jawa tengah dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ony Widilestariningtyas (2020) dan Renny Nur'ainy, Desfitriana, Rooswhan Budi Utomo (2013) yang dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. di lain sisi hasil penelitian ini menolak hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ramona Leny Gaghana , Paulus Kindangan , Debby Ch. Rotinsulu (2018), Krest D Tolosang (2018), Achla Nurus Shoba, Fidiana (2022) dan Maya Novitasari, Lita Novitasari (2019) di mana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa tengah belum berhasil mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dalam menciptakan kemandirian keuangan. Salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan ekonomi di Jawa tengah disumbang oleh aktivitas ekonomi yang kontribusinya lebih besar kepada pemerintah pusat dibandingkan pemerintah daerah, sehingga peningkatan PDRB tidak disertai dengan peningkatan PAD secara proporsional. Sektor industri pengolahan menjadi sektor yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB Jawa tengah, namun pajak yang dihasilkan dari sektor ini seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan kewenangan pemerintah pusat Artinya, sebagian besar penerimaan dari aktivitas ekonomi di Jawa Tengah langsung mengalir ke kas Pemerintah Pusat, bukan ke kas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah memiliki mekanisme dana bagi hasil dimana pajak yang ditarik pemerintah pusat seperti PPh, PPN, PPnBM dan lain sebagainya diakumulasikan dalam APBN sebelum nantinya dikembalikan ke daerah dengan persentase tertentu

sebagai upaya pemerataan antar daerah. Namun dana bagi hasil ini merupakan salah satu komponen dana terimbangan yang mana proporsi dana perimbangan yang besar dibandingkan dengan PAD justru menurunkan kemandirian keuangan daerah. Akibatnya, meskipun ekonomi daerah tumbuh, rasio PAD terhadap total pendapatan justru menurun, yang berarti derajat desentralisasi fiskal atau kemandirian keuangan daerah ikut menurun.

Keterbatasan kewenangan fiskal pemerintah daerah dalam mengakses sektor-sektor strategis menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak otomatis memperkuat posisi fiskal daerah. Pajak daerah umumnya hanya mencakup sektor jasa seperti hotel, restoran, dan hiburan, sedangkan sektor besar seperti pertambangan dan kehutanan dikuasai oleh pemerintah pusat. Dalam jangka panjang, ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal akan menciptakan ketidakseimbangan fiskal struktural, di mana belanja publik meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, namun tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan mandiri. Akibatnya, ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pusat semakin tinggi, sehingga menghambat pencapaian kemandirian keuangan yang ideal sebagaimana diharapkan dalam kerangka desentralisasi fiskal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, dalam periode 1996- 2023 Variabel ketimpangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dalam jangka panjang, tetapi tidak dalam jangka pendek. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. dan juga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di Jawa Tengah selama periode 1996-2023

Saran

Pemerintah perlu memfokuskan perhatiannya kepada peningkatan kapasitas fiskal daerah dan optimalisasi PAD, melalui sektor-sektor yang berdampak langsung pada penerimaan daerah. dan juga Strategi penurunan angka pengangguran harus bersifat berkelanjutan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, pengembangan industri lokal, menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendukung penciptaan lapangan usaha pada sektor padat karya. Kemudian Pemerintah perlu memperkuat investasi pada peningkatan kualitas serta keterjangkauan akses pendidikan dan kesehatan serta peningkatan standar hidup layak melalui pelatihan keterampilan. Dan juga pemerintah perlu mengalihkan fokus pertumbuhan ekonomi ke sektor-sektor yang berdampak secara langsung kepada pendapatan asli daerah, mulai pajak atau retribusi seperti UMKM, pariwisata lokal, ekonomi kreatif, pengelolaan aset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian noor rahman, & m. Handry imansyah. (2021). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi kalimantan selatan tahun 2010-2017. *Jurnal ilmu ekonomi dan pembangunan*.
- Amar, s., & aimon, h. (2014). *Pengaruh inflasi, kebijakan fiskal dan moneter terhadap pengangguran di indonesia*.
- Asmara, a., stannia, d., & suci, c. (2014). Pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan di provinsi banten influence of regional financial independence against poverty rates in banten. In *jurnal manajemen pembangunan daerah* (vol. 6, issue 1).
- Beramendi, p. (2003). *Political institutions and income inequality: the case of decentralization* *standard-nutzungsbedingungen*.
<https://hdl.handle.net/10419/51220>
- De mello jr, l. R. (2000). *Fiscal decentralization and intergovernmental fiscal relations: a cross-country analysis*. www.elsevier.com/locate/worlddev
- Deky aji suseno. (2013). Efektivitas dan kemandirian keuangan daerah provinsi jawa tengah pasca diterapkannya desentralisasi fiskal. *Economics development analysis journal*, 2(2). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Elsa siburian, m. (2021). *Fiscal decentralization, regional income inequality, and the provision of local public goods: evidence from indonesia* (vol. 46, issue 4).
- Gujarati, d. N. (2004). *Dasar dasar ekonometrika* (edisi ke 3). Erlangga.
- Hung, n. T., & thanh, s. D. (2022). Threshold effects of fiscal decentralization on income inequality: evidence from vietnam. *Cogent business and management*, 9(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2111851>
- Lütkepohl, helmut. (2005). *New introduction to multiple time series analysis*.
- Maryati, s., & ibnu muttaqin. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2016-2020. *Jurnal akuntansi dan bisnis kontemporer*, 2(1), 32.
- Nifah, izzun, & wardhani evita dyah. (2023). *Statistik keuangan pemerintah provinsi 2022-2023* (faghullah, ed.). Badan pusat statistik.
- Nur, a., & riya, d. (2024). Pengaruh kualitas pendidikan terhadap tingkat pengangguran di pulau jawa. *Jurnal ekonomi manajemen dan sosial*, 7(1), 26–36.
<https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/jemes>
- Pirmanto, d., labib jundillah, m., & aprian widagdo, k. (n.d.). *Jenis penelitian menurut kedalaman analisis data*.
- Prof. Dr. Sugiono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterperatif, interaktif, dan konstruktif*.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*.
- Rifaldo, m. D., & rejekinarsih, t. W. (2024). Analisis ketimpangan distribusi pendapatan di indonesia tahun 2015-2019. *Diponegoro journal of economics*, 13(2), 27–40. <https://doi.org/10.14710/djoe.43258>

- Robert arthur simanjuntak. (1998). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sumbangan pemikiran fe-ui reformasi dan pemulihan ekonomi . *Lpem-ui*.
- Rondinelli, d. A. ., nellis, j. R. ., & cheema, g. Shabbir. (1984). *Decentralization in developing countries : a review of recent experience*. World bank.
- Sadono sukirno. (2006). *Ekonomi pembangunan: proses, masalah dan dasar kebijakan* (2nd ed.). Kencana prenada media grup.
- Siregar, h. A. (2023). *Analisis pengaruh efektivitas dan efisiensi keuangan daerah terhadap derajat desentralisasi fiskal dengan mediasi pertumbuhan pendapatan asli daerah (pad) di kota pekanbaru periode. 11(2)*, 143–152. [Http://ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/procuratio/index](http://ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/procuratio/index)
- Syahrina syam, & abdul wahab. (2015). Pengaruh upah dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di kota makassar. *Iqtisaduna*, 1(1).
- Syauqi, i., sri, b. & fatmawati, w. (2014). *Irfan syauqi beik: pengaruh indeks harga saham syariah internasional pengaruh indeks harga saham syariah internasional dan variabel makro ekonomi terhadap jakarta islamic index*.
- Tiebout, c. M. (1956). A pure theory of local expenditures. In *source: the journal of political economy* (vol. 64, issue 5). [Http://www.jstor.orgurl:http://www.jstor.org/stable/1826343](http://www.jstor.orgurl:http://www.jstor.org/stable/1826343)accessed:28/07/200805:58
- Todaro, michael. P. (1994). *Ekonomi untuk negara berkembang* (3rd ed.). Bumi angkasa.